

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Sumber Lainnya

- Achmad Iqbal Arifn, Ajeng Susilowat Wibowo, Alfian Rizqi Kemal Akbar, Daffa Mahendra Nugraha, I. R. A. W. (2021). *PENGURUSAN PIUTANG NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) DI KPKNL SURABAYA*.
- DJKN, H. (2021). *Kejar 52.887 BKPN, DJKN Percepat Penyelesaian Piutang Negara*. Rabu, 29 September 2021 Pukul 16:41:21.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/25705/Kejar-52887-BKPN-DJKN-Percepat-Penyelesaian-Piutang-Negara.html>
- Firzada, M. I. (2017). *Penyelesaian Piutang Negara/Daerah Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*.
- Gabriela Thalia Wuwungan, Sanchia Darlene Rawis, V. Z. T. (2018). *IPTEK FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA OLEH PUPN DI KPKNL MANADO*. 02(02), 52–56.
- PM, W. (2021). *Pembinaan Kanwil DJKN Riau, Sumbar dan Kepri Ke KPKNL Pekanbaru*. Kamis, 04 Februari 2021.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru/baca-berita/23173/Pembinaan-Kanwil-DJKN-Riau-Sumbar-dan-Kepri-Ke-KPKNL-Pekanbaru.html>
- Samsul Chorib, Boedirijanto, & Pardede, A. (2014). *Pengurusan Piutang Negara. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Siregar, T. L. K. (2010). *Penyelesaian kredit macet pada Bank Mandiri melalui Lembaga Panitia Urusan Pitang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006*. 9–60.
- Yulia, V. (2010). *Analisis Yuridis Terhadap Upaya Penyelesaian Piutang Negara Macet Dalam Praktik Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia*. 1962042119.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01./2012 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal DJKN*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 Tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada K/L, BUN dan Pengurusan Sederhana Oleh PUPN.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Pengurusan Piutang.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.06/2022 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2022.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Transformasi Kelembagaan DJKN.

Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 96/KN/2017 tentang Pembakuan Laporan Kinerja di Lingkungan DJKN.

SE-1/KN/2020 tentang Program Percepatan Pengurusan Piutang Negara.